

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, A., Paramita, S., & Sudarto. (2022). Opini Publik Netizen Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Online. *Koneksi*, 6(2), 278–286. <https://doi.org/10.24912/Kn.V6i2.15670>
- Alda, W. F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Hukum*, Vol 7(40), 1–15. Diambil Dari <http://www.nber.org/papers/W16019>
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia. *Sasi*, 27(3), 335. <https://doi.org/10.47268/Sasi.V27i3.509>
- Amanda Permatasari, I., & Hendri Wijaya, J. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 27–41.
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia. *Administrative Law And Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/Alj.V3i1.114-123>
- Anggrieni, D. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Pers Dalam Perspektif Hukum Pidana*. 1–54.
- Arman, M., Akub, M. S., & Heryani, W. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online. *Jurnal Amana Gappa Sinta 4*, 26(1), 1–11.
- Arzy, V. N., & Sumiyati, Y. (2021). Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi Yang Merugikan Konsumen Dihubungkan Dengan Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 536. <https://doi.org/10.24843/Jmhu.2021.V10.I03.P08>
- Atmanagara, K. P. (2023). *Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Terkait Berita Bohong Menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Di Polda Sulsel*. 1–56.
- Djanggih, H., & Hipan, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/Pn.Sgm). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 93. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2018.V18.93-102>
- Dwi Kurniawan, K., & Indri Hapsari, D. R. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory. *Jurnal Hukum Ius Quia*

- Iustum*, 29(2), 324–346. <https://doi.org/10.20885/iustum.Vol29.Iss2.Art5>
- Efendi, I. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pers Melalui Media On Line Dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.36085/jpk.V3i2.1197>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Fairuz Rhamdhatul Muthia Dan Ridwan Arifin. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *Hukum*, 5(April), 21–39.
- Fatimah, F. (2020). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Journal Law Reform*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.14710/Lr.V7i2.12408>
- Friastutu, R. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *Jurnal Delegalata Ilmu Hukum*, 6(4), 16–32.
- Guntara, B. (2020). *Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya*.
- Guntara, D., & Abas, M. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pers Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Putusan Nomor. 6(1), 1544–1552*.
- Hadi, S., Anjab, F., & Ratminto, R. (2022). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 05(11), 657–667.
- Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru.
- Indonesia, P. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, (1), 1–5.
- Indonesia, P. R. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Bi.Go.Id*, (September), 1–2. Diambil Dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/Uu-No-11-Tahun-2008>
- Indonesia, P. R. (2019). Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pengabdian Papua*, 2(3). <https://doi.org/10.31957/V2i3.655>
- Izzatun Na'imah. (2020). *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Delik Pers Oleh Wartawan*. 80.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian

- Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01, 13–22. Diambil Dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Kameo, J., & Prasetyo, T. (2020). Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 308–327. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>
- Kansil, F. (2014). Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp. *Lex Crimen*, 3(3), 26–34.
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan K. K. N. R. I. (2021). *Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021* (Hal. 1–22). Hal. 1–22.
- Komalasari, A. N. (2022). Peranan Delik Dalam Fungsi Dan Perkembangan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *De Juncto Delicti: Journal Of Law*, 2(1), 49–59.
- Leuwol, T. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime Yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (Sara) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Nomor 19 Tahun 2016. *Journal Lex Crimen*, 7(2), 27–34.
- Megayati, D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Criminal Liability Default Through Social Media. *Unizarlawreview*, 5(1), 285. <https://doi.org/10.20961/recidive.v1i1i3.67461>
- Muchladun, W. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3, 1–8.
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan Bk Karier. *Quanta*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Ozan Saputra, Amiruddin, R. K. (2023). Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 507–518.
- Prasetyo, A. B. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers. *Journal Of Law*, 9(1), 1–14.
- Purba, I. D. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Meme Di Media Sosial. *Jurnal Tana Mana*, 4(3). Diambil Dari <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik

- Orang Lain Melalui Media Cetak Online. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 2(2), 123–139. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V2i2.14761>
- Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 58–80. <https://doi.org/10.29313/Aktualita.V0i0.5957>
- Samsuri, B. N. (2020). Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. In *Dewan Pers*. Diambil Dari [https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-buku-pers-berkualitas-masyarakat-cerdas_final.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-buku-pers-berkualitas-masyarakat-cerdas-final.pdf)
- Sihombing, T. R. (2020). Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Bussiness Law Binus*, 7(2), 33–48.
- Taufik, M. (2020). Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41–63. Diambil Dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad-Taufik-Filsafat-John-Rawls.pdf>
- Tri Mulyani, Dian Septiandani, D. I. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Siswa Smk Kristen Terang Bangsa Semarang Mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 4(1), 10–21.
- Wadjo, H. Z. (2019). Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers. *Jurnal Sasi*, Vol. 17(No. 2), 1–8.
- Wardani, Koko Arianto, S. E. W. (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 951–958.
- Widyastuti, A. R. (2023). *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Melalui Media Online (Criminal Acts Of Defamation Committed By The Press Through Online Media)*. 5(1), 50–65.
- Wijaya. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pengadilan Oleh Pers (Trial By The Press) Bagi Putusan Hakim Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde)*.
- Yelvita, F. S. (2022). *Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers*. (8.5.2017), 2003–2005.